

## Abstrak

### **Helvia Agustina “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut”.**

Tata kelola, manajemen pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat harus didesentralisasi secara regional agar lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, infrastruktur dan sumber daya komunikasi informasi adalah hambatan utama. masih banyak permasalahan yang di temukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut seperti Pemanfaatan sarana dan prasana yang belum optimal, Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal, Sumber daya manusia yang belum seluruhnya memahami tupoksi , Kurangnya kerjasama dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang *Good Governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut telah menerapkan prinsip – prinsip good Governance, menggunakan teori Sedarmayanti 2014 yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Kepastian Hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian berdasarkan Lexy Moleong 2022 di bagi tiga yaitu : observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Lexy Moleong 2022 yang terdapat empat tahapan yaitu 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; serta 4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1) pada prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik dibuktikan dengan selalu ada laporan setiap tahun kepada publik dan negara terkait tugas dan tanggung jawabnya. 2) pada prinsip keterbukaan sudah di terapkan dengan cukup baik namun masih ada satu indikator yang belum tercapai yaitu tersedianya wadah khusus untuk menampung kritik dan sarannya dari publik terutama untuk pihak yang terlibat seperti aparatur desa dan dinas terkait. 3) pada penerapan prinsip transparansi belum optimal dikarenakan ada beberapa indikator yang belum tercapai seperti belum adanya media informasi yang bisa di akses oleh seluruh masyarakat umum dengan secara mudah dan cepat. 4) pada prinsip aturan hukum telah diterapkan dengan cukup baik dibuktikan para aparatur pemerintah dan semua stakeholder dalam pelaksanaannya sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Good Governance, Penerapan, Pemberdayaan, Masyarakat.**

## ***Abstract***

### ***Helvia Agustina "Application of Good Governance Principles in the Garut Regency Community and Village Empowerment Service".***

*Governance, development management and community empowerment must be regionally decentralized to be more effective, efficient, transparent and accountable. However, information communication infrastructure and resources are major obstacles. There are still many problems found in the Garut Regency Community and Village Empowerment Service, such as the use of facilities and infrastructure that is not yet optimal, the activity monitoring and evaluation system is not optimal, human resources do not fully understand their main duties and functions, lack of cooperation in carrying out tasks, the Indonesian government has adopted principles of good governance. Law no. 30 of 2014 concerning Good Governance.*

*This research aims to analyze the extent to which the Garut Regency Community and Village Empowerment Service has implemented the principles of good governance, using the 2014 Sedarmayanti theory, namely: Accountability, Transparency, Openness and Legal Certainty.*

*This research uses descriptive qualitative research methods. Research data collection based on Lexy Moleong 2022 is divided into three, namely: observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques use the Lexy Moleong 2022 model which has four stages, namely 1) data collection; 2) data reduction; 3) data presentation; and 4) drawing conclusions/verification.*

*Based on the results of research conducted by researchers, researchers can draw the following conclusions: 1) the principle of accountability has been implemented well, as evidenced by the fact that there are always reports every year to the public and the state regarding their duties and responsibilities. 2) the principle of openness has been implemented quite well, but there is still one indicator that has not been achieved, namely the availability of a special forum to accommodate criticism and suggestions from the public, especially for parties involved such as village officials and related agencies. 3) the implementation of the principle of transparency is not yet optimal because there are several indicators that have not been achieved, such as the absence of information media that can be accessed by the general public easily and quickly. 4) the principle of the rule of law has been implemented quite well, proven by government officials and In its implementation, all stakeholders have carried out their main duties in accordance with applicable regulations.*

***Keywords: Good Governance, Implementation, Empowerment, Community.***